



PEMERINTAH
KABUPATEN

**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU**

**RENCANA
KERJA
(RENJA)**

2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT, atas berkat serta rahmat-Nya, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2025 dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2025 adalah merupakan Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yang merupakan tolok ukur dari pelaksanaan Perencanaan Strategik (Renstra) OPD sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau ini belum mengakomodir hasil musrenbang maupun usulan-usulan lainnya sehingga masih dimungkinkan untuk disempurnakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas saran dan masukan kearah perbaikannya diucapkan terima kasih.

Kepala DPMPTSP Kab. Berau



Ir. H. Nanang Bakran, ST. MT
Pembina Tk. 1
NIP. 19710215 199503 1 006



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu	7
2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	14
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD.....	14
3.2. Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) OPD	14
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang akan direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2026. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Renja SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, DPMPTSP Kabupaten Berau dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan birokratisasi. Dengan pendekatan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Berau mempunyai peran penting dalam mewujudkan Kabupaten Berau sebagai tujuan investasi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Berau adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
16. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
24. Peraturan Bupati Berau Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau;
25. Peraturan Bupati Berau Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPPT Kabupaten Berau;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPMPTSP.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2025.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Berau, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DPMPTSP, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.2. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan – permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2021 – 2026 yang akan dibuat memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan DPMPTSP selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Kondisi daerah Kabupaten Berau terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja DPMPTSP Kabupaten Berau ditunjang dengan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00% kegiatan yang dilaksanakan mengikuti musrenbang tingkat Kecamatan / Provinsi dan koordinasi terkait perencanaan pelaksanaan program OPD.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.831.735.606,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 311.724.747,- Atau 6,45% untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai DPMPTSP Kab. Berau.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksana Tugas ASN :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 212.707.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00% untuk membayar jasa penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, tenaga operater komputer dan tenaga caraka.

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00% kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan pakaian dinas.

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00% kegiatan ini ditujukan untuk belanja Bimbingan Teknis untuk menambah pengetahuan Pegawai.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.703.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.



Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 199.908.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00% yang digunakan untuk belanja modal Mebel, Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer, peralatan Komputer lainnya dan lain-lain.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 64.999.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00% yang digunakan untuk belanja natura dan pakan-natura serta belanja makan dan minum rapat.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor yang terkait dengan administrasi perkantoran dan foto copy.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan majalah.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan luar kabupaten.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.484.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk Kegiatan ini untuk surat menyurat, belanja Materai dan Benda Pos Lainnya.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 164.999.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Belanja tagihan air Kantor selama 12 bulan
- Belanja Tagihan Listrik selama 12 bulan
- Belanja Kawat/Internet/TV Berlangganan selama 12 bulan



Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 524.600.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 81.200.000,- Atau 15,48%. Bentuk kegiatan ini diperuntukkan membayar jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga supir, iuran jaminan kesehatan non ASN, iuran JKK non ASN dan iuran JKM non ASN.

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 206.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan baik suku cadang, bahan bakar minyak, pembayaran pajak, bea dan perizinan serta pemeliharaan alat angkutan bermotor lainnya.

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.930.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan alat dan mesin kantor.

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.999.620,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan gedung kantor.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 124.996.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pendataan potensi dan peluang usaha Kabupaten.



3. Program Promosi Penanaman Modal

a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan strategi promosi penanaman modal yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.918.573.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Promosi Investasi Penanaman Modal serta Kegiatan Berau Expo.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

a) Kegiatan Pelelayana Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 207.148.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan konsultasi serta membayar honor tim, dimana target 100 orang yang ingin harus dicapai dalam kegiatan sosialisasi.

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik:

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 229.665.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini peninjauan lokasi untuk pelayanan perizinan dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi, pembayaran honor tim.



Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 154.988.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,0%. Bentuk kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dengan target kinerja 55 kegiatan usaha serta membayar honor tim.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.354.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,0% dengan produk yang dihasilkan berupa mengevaluasi hasil aduan dari masyarakat dengan target kinerja 10 kegiatan usaha, perjalanan dinas luar dan dalam daerah serta pembayaran honor tim.

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 486.688.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,0% dengan produk yang dihasilkan berupa Pembinaan ke Perusahaan tentang LKPM dan sosialisasi LKPM online dan Perijinan OSS, dimana untuk sosialisasi LKPM online dan OSS. Untuk pembinaan ke Perusahaan terdapat 55 Pelaku Usaha yang ingin dibina terkait LKPM.

Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 134.548.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00% kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan pengawasan dan penertiban pelayanan perizinan dan non perizinan, dimana dalam pengawasan ada 45 kegiatan usaha target kinerja yang ingin dicapai.



6. Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

a) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- Atau 0,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah serta belanja pemeliharaan komputer jaringan.

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang akan direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Kaltim, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran makro ekonomi dan makro sosial, yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, DPMPTSP Kabupaten Berau dituntut untk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, DPMPTSP dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2025 akan didasarkan kepada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka mewujudkan Misi DPMPTSP Kabupaten Berau, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang operasional yang dituangkan dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2025, yaitu :

Tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Meningkatkan investasi dan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Berau.

Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Nilai Investasi dan Sistem Pelayanan.

3.2 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kebijakan operasional DPMPTSP adalah Peningkatan kualitas pelayanan melalui profesionalisme aparatur DPMPTSP dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen yang dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi DPMPTSP, dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- kegiatan yang dilaksanakan mengikuti musrenbang tingkat Kecamatan / Provinsi dan koordinasi terkait perencanaan pelaksanaan program OPD dan pembuatan dokumen.



b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.831.735.606,- kegiatan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai DPMPTSP Kab. Berau.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksana Tugas ASN :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 212.707.000,- kegiatan untuk membayar jasa penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, tenaga operater komputer dan tenaga caraka.

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.500.000,- dan kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan pakaian dinas.

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan kegiatan ini ditujukan untuk belanja Bimbingan Teknis untuk menambah pengetahuan Pegawai.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.703.000,- Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 199.908.600,- kegiatan yang digunakan untuk belanja modal Mebel, Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer, peralatan Komputer lainnya.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 64.999.300,- kegiatan yang digunakan untuk belanja natura dan pakan-natura, belanja makan dan minum rapat.



Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,- Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor yang terkait dengan administrasi perkantoran dan foto copy.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- Kegiatan ini untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan majalah.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan luar kabupaten.

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Bentuk kegiatan ini adalah pembelian atau pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.484.000,- bentuk Kegiatan ini untuk surat menyurat, belanja Materai dan Benda Pos Lainnya.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 164.999.800,- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Belanja tagihan air Kantor selama 12 bulan
- Belanja Tagihan Listrik selama 12 bulan
- Belanja Kawat/Internet/TV Berlangganan selama 12 bulan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 524.600.000,- Bentuk kegiatan ini diperuntukkan membayar jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga supir, iuran jaminan kesehatan non ASN, iuran JKK non ASN dan iuran JKM non ASN.



g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 206.000.000,- Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan baik suku cadang, bahan bakar minyak, pembayaran pajak, bea dan perizinan serta pemeliharaan alat angkutan bermotor lainnya.

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.930.000,- Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan alat dan mesin kantor.

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.999.620,- Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan gedung / kantor.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 124.996.000,- bentuk kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pendataan potensi investasi Kabupaten dengan target kinerja 3 dokumen potensi usaha investasi.

3. Program Promosi Penanaman Modal

a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.918.573.000,- bentuk kegiatan ini berupa perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Pameran Investasi dan Berau Expo.

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kab/Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- bentuk kegiatan ini berupa pembuatan dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal.



4. Program Pelayanan Penanaman Modal

a) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penetapan Fasilitas / Insentif Daerah :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 207.148.000,- Bentuk kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan konsultasi serta membayar honor tim, dengan target kinerja pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebanyak 60 orang.

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 229.665.200,- bentuk kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka advis izin dan konsultasi serta membayar honor tim, dengan target kinerja 2200 pelaku usaha.

Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 154.988.000,- bentuk kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha serta membayar honor tim, dengan target kinerja 55 kegiatan usaha yang akan dicapai.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.354.800,- Bentuk kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka pendataan aduan dari masyarakat, konsultasi dan membayar honor tim, dengan target kinerja ada 10 kegiatan usaha.



Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 486.688.600,- kegiatan yang dihasilkan berupa Pembinaan ke Perusahaan tentang LKPM dan Sosialisasi LKPM online serta Perizinan OSS RBA, dengan target kinerja 55 Pelaku Usaha yang akan dilakukan pembinaan.

Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 134.548.000,- kegiatan yang dilaksanakan berupa pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan target kinerja 45 kegiatan usaha perizinan dan non perizinan.

6. Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

a) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah, belanja cetak serta pemeliharaan komputer jaringan terkait OSS RBA, dengan target kinerja 52 Dokumen.



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Berau maupun dengan SKPD terkait di Kab/Kota se Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, Februari 2024

Kepala Dinas,



Ir. H. Nanang Bakran, ST.MT
Pembina Tk. 1
NIP. 19710215 199503 1 006



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN BERAU**

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
2													
Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2	18												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2	18	0	00	01	DPMPTSP	Mempertahankan Kinerja Ekonomi Daerah							
2	18	01			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	Kab. Berau	100 %	6.733.566.926	APBD		100 %	8.020.074.257
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000				110.000.000
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Berau	4 Dok	100.000.000	APBD		4 Dok	110.000.000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.044.442.606				5.548.886.867
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Berau	12 Bulan	4.831.735.606	APBD		12 Bulan	5.314.909.167
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau	1 Dokumen	212.707.000	APBD		1 Dokumen	233.977.700
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.500.000				83.050.000
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Kab. Berau	47 Steel	25.500.000	APBD		48 Steel	28.050.000
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	Kab. Berau	3 Orang	50.000.000	APBD		4 Orang	55.000.000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				536.610.900				590.271.990
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	4 Paket	1.703.000	APBD		4 Paket	1.873.300



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau

2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	12	Paket	199.908.600	APBD	13	Paket	219.899.460	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	12	Paket	64.999.300	APBD	12	Paket	71.499.230	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Berau	7	Paket	60.000.000	APBD	8	Paket	66.000.000	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Berau	750	Dokumen	10.000.000	APBD	750	Dokumen	11.000.000	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau	56	Laporan	200.000.000	APBD	58	Laporan	220.000.000	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah					-				500.000.000	
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	Kab. Berau	1	Unit	-	APBD	1	Unit	500.000.000	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					691.083.800				778.342.400	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau	100	Laporan	1.484.000	APBD	120	Laporan	1.632.400	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Berau	12	Laporan	164.999.800	APBD	12	Laporan	199.650.000	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Berau	13	Laporan	524.600.000	APBD	13	Laporan	577.060.000	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					285.929.620				409.523.000	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan dan perijinan	Kab. Berau	18	Kendaraan	206.000.000	APBD	18	Kendaraan	226.600.000	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	Kab. Berau	16	Unit	29.930.000	APBD	20	Unit	32.923.000	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dirawat	Kab. Berau	1	Gedung	49.999.620	APBD	1	Gedung	150.000.000	
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berskala nasional (PMDN / PMA)	Kab. Berau	370	Investor	124.996.000			375	Investor	137.495.600



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau

2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota					124.996.000					137.495.600
2	18	02	2.02	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Berau	3	Dokumen	124.996.000	APBD		4	Dokumen	137.495.600
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi didalam dan diluar daerah kabupaten	Kab. Berau	2	Kegiatan	4.168.573.000			3	Kegiatan	4.585.430.300
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					4.168.573.000					4.585.430.300
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Berau	2	Dokumen	3.918.573.000	APBD		3	Dokumen	4.310.430.300
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Berau	3	Dokumen	250.000.000	APBD		4	Dokumen	275.000.000
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi berskala Nasional (PMDN dan PMA)	Kab. Berau	4	Triliun Rupiah	591.801.200			4	Triliun Rupiah	650.981.320
2	18	04	2.01		Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					591.801.200					650.981.320
2	18	04	2.01	05	Koordinasi dan Konsultasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Berau	3	Dokumen	207.148.000	APBD		4	Dokumen	227.862.800
2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Berau	3850	Pelaku Usaha	229.665.200	APBD		3885	Pelaku Usaha	252.631.720



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau

2	18	04	2.01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Berau	55	Kegiatan Usaha	154.988.000	APBD	60	Kegiatan Usaha	170.486.800
2	18	05			Program Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Investor yang Berinvestasi	Kab. Berau	90	%	791.591.400		95	%	870.750.540
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					791.591.400				870.750.540
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Berau	10	Kegiatan Usaha	170.354.800	APBD	11	Kegiatan Usaha	187.390.280
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Berau	55	Pelaku Usaha	486.688.600	APBD	58	Pelaku Usaha	535.357.460
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Berau	45	Kegiatan Usaha	134.548.000	APBD	50	Kegiatan Usaha	148.002.800
2	18	06			Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Berau	52	Dokumen	200.000.000		52	Dokumen	220.000.000
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000				220.000.000



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau

2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Berau	38	Dokumen	200.000.000	APBD	40	Dokumen	220.000.000
					Total				12.610.528.526				14.484.732.017	



Tanjung Redeb, Februari 2024
Kepala Dinas

Ir. H. Nanang Bakran, ST. MT
NIP. 19710215 199503 1 006